

DETERMINAN OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA

Karina Ultra Meza¹⁾, Rita Martini²⁾, Rosy Armaini³⁾
^{1,2,3)} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
email: rosyarmaini@polsri.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh temuan audit, ukuran pemda, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi www.bpk.go.id. Populasi penelitian berjumlah 154 kabupaten/kota se-Sumatera dengan total sampel sebanyak 462. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi logistik dengan bantuan Software Eviews 12. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Pemda dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Opini Audit. Sebaliknya, Temuan Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Opini Audit. Selanjutnya, secara bersamaan Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Opini Audit atas LKPD Kabupaten/Kota se-Sumatera.

Kata kunci: Temuan, opini audit, laporan keuangan

Abstract

This study aims to determine the effect of audit findings, regional government size, timeliness involving financial reports, and follow-up on the audit results of opinion audits on the financial reports of regency/city regional governments throughout Sumatra. The research is a quantitative research using secondary data obtained from the official website www.bpk.go.id. The population in this study were 154 regencies/cities throughout Sumatra with a total sample of 462. The sample selection for this study used the saturated sample method. Testing the hypothesis of this study using logistic regression analysis with the help of Eviews 12 Software. The results of this study indicate that partially the size of the local government and the follow-up of audit results have a positive and significant effect on audit opinions. In contrast, the Audit Findings and Timeliness of Submission of Financial Statements have no effect and are not significant on the Audit Opinion. The simultaneous test shows that the variables of audit findings, regional government size, timeliness of submission of financial statements and follow-up of audit results together have a significant effect on audit opinion on LKPD in regency/city in Sumatra.

Keywords: Findings, audit opinion, financial reports

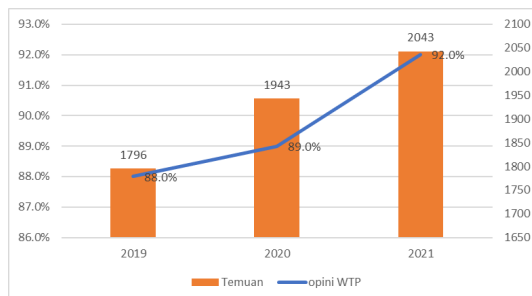
1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Selain itu, dalam menyusun sistem akuntansi pada pemerintah daerah, kepala daerah juga mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan daerah kepala daerah bertugas menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang penyusunannya mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan peraturan ini, kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan LKPD kepada BPK dalam

kurun waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selaku auditor eksternal BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah untuk memberikan pendapat yang berupa pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dimuat dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Dengan adanya opini yang diberikan BPK tentunya dapat menggambarkan baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah tersebut, dan setidaknya dapat mengurangi adanya asimetrik informasi diantara pemerintah dan masyarakat. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini atas Laporan Keuangan, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).



Sumber: IHPS I Tahun 2022 (Data diolah, 2023)

Gambar 1 Capaian Opini WTP Temuan Audit atas LKPD se-Sumatera Tahun 2019-2021

Pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera, opini audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) turut mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019, sebanyak 135 dari 154 LKPD (88%) se-Sumatera meraih opini WTP dan menjadi 141 dari 154 LKPD (92%) pada tahun 2021. Hal ini tentunya juga disertai banyaknya temuan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Dengan adanya fenomena ini seakan mengisyaratkan bahwa standar pemeriksaan belum berfungsi sebagaimana mestinya. Seharusnya pemerintah daerah bisa memperoleh opini

WTP jika jumlah temuan auditnya relatif rendah. Namun sebaliknya, jika terdapat pemerintah daerah yang jumlah temuannya relatif kecil/rendah namun tidak memperoleh opini WTP bisa dimaklumi karena terdapat kemungkinan faktor lain selain temuan audit yang mempengaruhi opini audit yang dikeluarkan oleh BPK. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap Undang-Undang merupakan faktor yang mempengaruhi opini audit. Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa baik tidaknya opini yang diberikan BPK dipengaruhi oleh efektif atau tidaknya SPI dan patuh tidaknya terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Merujuk pada penelitian (Amyulianthy, 2020), (Rahmi & Ariani, 2020), (Nadirisyah & Abdullah, 2016) menunjukkan hasil bahwa temuan audit berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah.

Jumlah total aset yang besar pada pemerintah cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang rendah. Pengelolaan aset daerah tentunya bukan merupakan pekerjaan yang mudah, hal ini terbukti dari masih terdapat banyak temuan pemeriksaan terkait aset tetap pemerintah daerah dalam pemeriksaan atas LKPD tahun 2021 (BPK RI, 2022). Hasil penelitian sebelumnya (Salsabila & Wahyudi, 2022) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting karena kegunaan laporan keuangan berkurang bila tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan (PP 71 Tahun 2010). Penelitian (Sutaryo, Naviantia, & Muhtar, 2020) menyatakan bahwa ketepatan waktu penyampaian LKPD berpengaruh positif terhadap opini laporan keuangan.

Dilansir dari berita siaran pers BPK RI yang berjudul “Tindak Lanjut Pemda dan BUMD Tentukan Efektivitas Hasil Pemeriksaan BPK” menjelaskan bahwa secara kumulatif hingga Semester I Tahun 2022, entitas yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan atau penyerahan aset ke

negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,60 triliun. Diantaranya, sebesar Rp24,58 triliun, berasal dari entitas pemerintah daerah dan BUMD. Terkait hal tersebut, efektivitas hasil pemeriksaan BPK ditentukan oleh tindak lanjut dari entitas yang diperiksa, termasuk pemerintah daerah dan BUMD” (BPK RI, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan menggunakan variabel temuan audit, ukuran Pemda, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penelitian ini menjadikan laporan keuangan kabupaten/kota se-Sumatera periode tahun 2019-2021 sebagai objek penelitiannya.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Opini Audit

Opini (BPK RI, 2020) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan, yang diperiksa (Tobing & Nirwana, 2004).

2.2 Temuan Audit

Temuan adalah hasil audit yang menjelaskan tentang semua informasi penting yang berkaitan dengan masalah audit tertentu Bastian (2013:316). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengemukakan bahwa hasil pemeriksaan oleh BPK selain opini juga terdapat catatan, temuan, kesimpulan dan juga rekomendasi atas pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI menjelaskan tentang temuan pemeriksaan yang terbagi menjadi dua, yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3 Ukuran Pemda

Salah satu faktor pembentuk karakteristik pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dalam konteks pemerintah daerah dapat digambarkan dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah (Lestari, Rahayu, & Yudi, 2019). Aset merupakan salah satu komponen terbesar yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan juga menjadi sumber daya penting bagi pemda sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah penting untuk mengelola aset daerah secara akuntabel dan transparan. Variabel ukuran pemda pada penelitian ini diproses dengan total aset yang dimiliki oleh masing-masing pemda dengan menggunakan rumus Logaritma Natural (Ln) guna menyederhanakan nilai aset.

2.4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal bertugas melakukan pemeriksaan terhadap LKPD disetiap tahun anggaran. Oleh Karena itu, pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Sesuai dengan amanat Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang mewajibkan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) untuk menyampaikan LKPD kepada BPK dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan karakteristik utama dalam informasi akuntansi (Owusuh & Ansah, 2000) dalam penelitian (Taufik, 2013), hal ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari karakteristik kualitatif laporan keuangan yakni relevan. Informasi dapat dikatakan relevan apabila informasi tersebut tersedia tepat waktu sebelum pengambilan keputusan.

2.5 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilakukan entitas yang diperiksa dan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil

pemeriksaan. Sebagai langkah percepatan tindak lanjut penyelesaian atas temuan BPK (BPKP, 2017). Tujuan dari laporan hasil tindak lanjut ialah menyediakan informasi bagi *stakeholder* mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang dihasilkan oleh audit kinerja. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 menjelaskan bahwa BPK memberikan rekomendasi berupa saran, terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh entitas untuk memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan yang telah terjadi.

Rekomendasi yang diberikan oleh BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan terhadap entitas yang bersangkutan. Sebagai *agent* pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi agar mampu meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik pada periode selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

- H₁: Temuan audit berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD
- H₂: Ukuran pemda berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD
- H₃: Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD
- H₄: Tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini audit atas LKPD
- H₅: Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berpengaruh terhadap Opini Audit atas LKPD

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2019-2021 yang diperoleh melalui situs www.bpk.go.id, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota Se-Sumatera Tahun Anggaran 2019-2021 dan Daftar Rekapitulasi Tanggal Penyerahan LKPD serta Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019-2020 yang diperoleh dari *media center* BPK RI. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan alat analisis *Software Econometrics Views 12 (EViews)*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berikut hasil dari uji analisis regresi logistik:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Logistik

Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-3.282263	1.088359	-3.015790	0.0026
X1_TA	-0.036826	0.051347	-0.717196	0.4733
X2_UP	0.151902	0.064453	2.356795	0.0184
X3_KW	1.324402	1.241950	1.066388	0.2862
X4_TLHP	0.018910	0.006659	2.839867	0.0045

Sumber: Hasil *Output* Eviews 12, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabel 1, diperoleh model persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$OA = \alpha + \beta_1 TA + \beta_2 UP + \beta_3 KW + \beta_4 TLHP + \epsilon$$

$$OA = -3,282263 - 0,03682TA + 0,151902UP + 1,324402KW + 0,018910TLHP + \epsilon$$

Keterangan:

- OA : Opini Audit
- α : Konstanta
- β : Koefesien Regresi Variabel
- TA : Temuan Audit
- UP : Ukuran Pemda
- KW :Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
- TLHP : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- ϵ : *Error*

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

McFadden R-squared	0.398412	Mean dependent var	0.898268
S.D. dependent var	0.302623	S.E. of regression	0.222814
Akaike info criterion	0.417335	Sum squared resid	22.68834
Schwarz criterion	0.462092	Log likelihood	-91.40429
Hannan-Quinn criter.	0.434956	Deviance	182.8086
Restr. deviance	303.8769	Restr. log likelihood	-151.9385
LR statistic	121.0683	Avg. log likelihood	-0.197845
Prob(LR statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil *Output* Eviews 12, 2023

Nilai *McFadden R-Squared* sebesar 0,398412 artinya 39% variansi opini audit dapat dijelaskan oleh temuan audit, ukuran pemda, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sementara sisanya sebesar 61% dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial dapat dilihat dari nilai *z-statistic* uji signifikan yang membandingkan nilai α (0,05) dengan nilai *prob.* yang ada pada tabel 1 dengan penjelasan dibawah ini:

Temuan Audit (X_1) dengan nilai t-hitung pada *z-statistic* sebesar -0,717196 dan *probability value* sebesar 0,4733, hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (-0,717196 < 1,965168) dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,4733 > 0,05), sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Temuan Audit tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Opini Audit.

Ukuran Pemda (X_2) memiliki nilai t-hitung pada *z-statistic* sebesar 2,356795 dan *probability value* sebesar 0,0184, hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,356795 > 1,965168) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,0184 < 0,05), artinya variabel Ukuran Pemda memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Opini Audit.

Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (X_3) memiliki nilai t-hitung pada *z-statistic* sebesar 1,066388 dan *probability value* sebesar 0,2862, hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel (1,066388 < 1,965168) dan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (0,2862 > 0,05), dapat disimpulkan variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Opini Audit.

Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan (X_4) memiliki nilai t-hitung pada *z-statistic* sebesar 2,839867 dan *probability value* sebesar 0,0045, hal ini menunjukkan bahwa nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel (2,839867 > 1,965168) dan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 (0,0045 < 0,05), hal ini berarti bahwa variabel Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel Opini Audit.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian statistik dengan uji F dapat dilihat pada tabel 2 dengan penjelasan dibawah ini:

Nilai F-hitung pada *LR Statistic* sebesar 121,0683 dan nilai signifikansi pada *Prob (LR statistic)* sebesar 0,000000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai F-hitung 121,0683 lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 2,391453 (121,0683 > 2,391453) dan nilai signifikansi 0,000000 lebih kecil dari 0,05 (0,000000 < 0,05), dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Kabupaten/Kota se-Sumatera tahun 2019-2021.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Temuan Audit Secara Parsial terhadap Opini Audit

Hasil pengujian hipotesis uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel Temuan Audit sebesar -0,717196. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel (-0,717196 < 1,965168). Selain itu, nilai signifikansi variabel Temuan Audit pada penelitian ini menunjukkan nilai di atas tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,4733. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pamungkas & Abtida, 2018) dan (Salsabila & Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa Temuan Audit tidak memiliki pengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini menjelaskan bahwa semakin banyaknya kasus temuan audit tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan serta tidak terpenuhinya SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga dapat menimbulkan kerugian negara, artinya semakin banyak temuan audit yang diperoleh auditor, dapat dikatakan tidak dapat pula mempengaruhi tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Pemda Secara Parsial terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel Ukuran Pemda sebesar 2,356795. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($2,356795 > 1,965168$). Selain itu, nilai signifikansi variabel Ukuran Pemda pada penelitian ini menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,0184. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Pemda secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H_2) dalam penelitian ini diterima. Penelitian sebelumnya oleh (Salsabila & Wahyudi, 2022) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemda berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin baik pula opininya.

4.2.3 Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Secara Parsial terhadap Opini Audit

Hasil pengujian hipotesis uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan sebesar 1,066388. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari nilai t-tabel ($1,066388 < 1,965168$). Selain itu, nilai signifikansi variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada penelitian ini menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,2862. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Eleazer & Ratih, 2022) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan pendapat atau opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Hal ini juga diperkuat dengan kriteria pemberian opini audit yang didalamnya tidak terdapat indikator ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

4.2.4 Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Secara Parsial terhadap Opini Audit

Hasil pengujian hipotesis uji t (parsial), nilai t-hitung untuk variabel Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan sebesar 2,839867. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai t-tabel ($2,356795 > 1,965168$). Selain itu, nilai signifikansi variabel Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan pada penelitian ini menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,0045. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat (H_4) dalam penelitian ini diterima. Penelitian sebelumnya oleh (Arianto & Heriyanto, 2018) dan (Amyulianthy, 2020) juga menyimpulkan bahwa variabel Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan berpengaruh terhadap Opini Audit. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dilakukan suatu pemerintah daerah dapat mencerminkan baik tidaknya pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah, dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, maka laporan keuangan yang akan disajikan sudah bebas dari salah saji yang material, sehingga opini yang akan dikeluarkan oleh BPK terkait tingkat kewajaran atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut akan semakin baik.

4.2.5 Pengaruh Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Secara Simultan terhadap Opini Audit

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Pengaruh Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit memiliki nilai F-hitung sebesar 121,0683. Jika dibandingkan dengan F-tabel sebesar 2,391453 maka F-hitung lebih besar dari F-tabel ($121,0683 > 2,391453$). Selain itu, nilai signifikansi variabel Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara bersama-sama

menunjukkan nilai di bawah tingkat signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) yaitu sebesar 0,000000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Temuan Audit, Ukuran Pemda, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara simultan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera. Hal ini berarti bahwa hipotesis kelima (H_5) dalam penelitian ini diterima. Berdasarkan kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) dari nilai *McFadden R-Squared* sebesar 0,398412. Hal ini berarti sebesar 39% variabel dependen yaitu Opini Audit di Kabupaten/Kota se-Sumatera dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri dari temuan audit, ukuran pemda, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sementara sisanya sebesar 61% dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel lain mengenai opini audit diluar penelitian ini. Sesuai dengan pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2018:250), maka untuk nilai sebesar 0,398412 atau jika dalam persentasi sebesar 39% nilai ini masuk dalam interval koefisien 0,20 – 0,399 yang berarti bahwa tingkat hubungan atau pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen lemah.

5. SIMPULAN

Ukuran pemda dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap opini audit atas LKPD di kabupaten/kota se- Sumatera periode tahun 2019-2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya ukuran pemda yang dimiliki maka semakin kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya serta meningkatkan kinerja keuangannya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja yang baik akan memperbaiki tingkat kewajaran laporan keuangan. Pada dasarnya dengan pemerintah daerah melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK tentunya akan memperbaiki kelemahan dan ketidakpatuhan

yang telah terjadi sehingga akan memperbaiki tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut.

Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data dengan rentang waktu periode yang terbaru serta diharapkan menambah objek penelitian atau memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh lebih tergeneralisasi. Diharapkan juga pada penelitian selanjutnya menambah variabel independen yang memiliki keterkaitan dengan opini audit diluar dari penelitian ini.

REFERENSI

- Amyulianthy, R. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit. *Jurnal Penelitian Akuntansi*.
- Arens. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga.
- Armainsi, R., & Yevi, D. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3, 68-78. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.3837935>
- Bangsawan, A. A. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan.
- Bastian, I. (2007). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- BPK-RI. (2007). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Akuntansi Pemeriksaan Keuangan Negara*.
- _____ (2017). *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*.
- _____ (2022). *Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I*.

- Eleazer, F., & Ratih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Probabilitas, Leverage dan Opini Auditor Terhadap Audit Report Lag Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020. *Jurnal Ekonomi dan Teknik*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. (Ketujuh ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Lestari, K., Rahayu, S., & Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UNJA*.
- Nadirsyah, M., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi*, 11.
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factor Influencing Audit Opinion of The Indonesian Municipal Governments Financial Statements. *Cogent Business & Management*.
- Pemerintah Indonesia (2018). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
- _____ (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Lembaga Negara Republik Indonesia.
- _____ (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.
- Pratiwi, R., & Aryani, Y. A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, dan Tindak Lanjut Temuan Audit terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi*, 167-189.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 497-505.
- Rosadi, S., & Okfitasari, A. (2019). Pengaruh Karakteristik pemerintah Daerah dan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Terhadap Opini Audit BPK. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Salsabila, R., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Temuan Audit , Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nasional*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit Opinion on Government Financial Report: Evidence from Local Governments in Indonesia. *Journal of Economics and Management*, 129-144.
- Tobing, R., & Nirwana. (2004). *Kamus Istilah Akuntansi*. Jakarta: Atalya Rileni Sucedo.
- Republik Indonesia (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Lembaga Negara Republik Indonesia.

Widodo, O. P., & Sudarno. (2017). Pengaruh Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1-9.